

**DAMPAK BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BELUI  
KECAMATAN DEPATI VII  
KABUPATEN KERINCI**

**ANISA KURNIA, HERLINDA, MASNON**

**STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH**

**Email:**

[lindaherlinda353@gmail.com](mailto:lindaherlinda353@gmail.com)

[masnonmsi@gmail.com](mailto:masnonmsi@gmail.com)

[anisakurnia012@gmail.com](mailto:anisakurnia012@gmail.com)

**ABSTRACK**

The Impact of Direct Cash Assistance on the Economy of the Community of Depati Tujuh District (Special Study of Belui Village) Kerinci Regency 2020 Department of State Administration Sciences College of State Administration Science Nusantara Sakti STIA-NUSA Sungai Penuh. The impact of Direct Cash Assistance (BLT) is assistance from the government to the community to maintain the purchasing power of the poor in rural areas affected by the Corona Virus Pandemic (COVID-19) situation. Direct Cash Assistance (BLT) is one form of assistance during the COVID-19 Pandemic. The condition for the recipients is that poor families who are not recipients of the Family Hope Program (PKH), do not get a basic food card, Pre-Employment Card and other types of assistance. According to M. Manullang, the notion of economics is the study of how to fulfill the desires of humans of society for the achievement of prosperity or conditions in which humans can meet their needs, both in the form of goods and services. In connection with the above, the village economy is a community activity in developing the village economic system. The village is a legal community unit that has jurisdictional boundaries and is authorized to regulate and manage the interests of the local community. This study aims to see and assist the community in the economic problems faced during the Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic in Belui Village, Depati Tujuh District, Kerinci Regency 2020. This type of research is a qualitative descriptive approach. The data sources in this study used interview and documentation.

**Key words: Impact of BLT, on the Economy**

**ABSTRAK**

Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Perekonomian Masyarakat Kecamatan Depati Tujuh (Studi Khusus Desa Belui) Kabupaten Kerinci 2020. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Nusantara Sakti STIA-NUSA Sungai Penuh. Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di pedesaan yang terdampak situasi Pandemi Virus Corona (COVID-19). Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu bentuk bantuan selama

Pandemi COVID-19. Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan jenis bantuan lainnya. Menurut M. Manullang pengertian Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran atau kondisi dimana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Berkaitan dengan hal di atas, Perekonomian di desa merupakan suatu kegiatan masyarakat dalam mengembangkan sistem perekonomian desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Studi ini bertujuan untuk melihat dan membantu masyarakat dalam masalah perekonomian yang dihadapi selama Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Desa Belui Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci 2020. Jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.

**Kata kunci :** Dampak BLT, dalam Perekonomian

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dampak terjadinya Pandemi Virus Corona (COVID-19) yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, salah satunya dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerintah bertekad untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah terutama masyarakat miskin melalui program kompensasi, yang berupa program pembangian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di pedesaan yang terdampak situasi Pandemi Virus Corona (COVID-19). Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu bentuk bantuan selama Pandemi COVID-19. Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan jenis bantuan lainnya.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana desa tahun 2020 sebagai jaringan pengaman sosial dan memberikan indikasi kemampuan dalam program bantuan secara transparan dan akuntabel dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban warga selama masa Pandemi COVID-19 ini.

Kepala desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program prioritas harus dianggarkan oleh pemerintah desa. Pendamping dan pengawasan terhadap pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Adapun fenomena yang terjadi di lapangan atau di Desa Belui yaitu :

1. Dengan adanya BLT membuat sebagian masyarakat menjadi malas untuk bekerja.
2. Dampak Pandemi COVID-19 mengakibatkan sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan/mata pencaharian.
3. Setelah pemberian BLT masih ada sebagian dari masyarakat menggunakan BLT untuk keperluan lain.
4. Dalam pembagian BLT masih terdapat sebagian masyarakat miskin yang tidak mendapatkan BLT.

Dengan demikian berdasarkan fenomena-fenomena diatas maka penulis merasa tertarik dan berkeinginan untuk mengadakan penelitian yang diberi judul tentang **“Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Belui Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penegasan atas pokok masalah yang akan dikaji, yang diformulasikan dalam wujud pertanyaan yang memerlukan jawaban. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu: **“Bagaimanakah Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Belui Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Belui Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci.

## **1.4 Manfaat Peneliti**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.5.1. Manfaat Akademis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dalam mengembangkan wawasan berfikir dan menambah ilmu pengetahuan dibidang ilmu administrasi dan manajemen khususnya mengenai BLT.

### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang kondisi masyarakat Desa Belui Kecamatan Depati VII dan menambah pengetahuan penulis tentang keberhasilan Bantuan Langsung Tunai Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut TEORI Malthus jumlah penduduk berkembang sesuai deret ukur sedangkan produksi bahan pangan berkembang sesuai deret hitung. Hal ini mengakibatkan kelebihan bahan pangan. Kekurangan bahan pangan merupakan salah satu indikasi terjadinya kemiskinan. Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000) sebagai berikut :

- a. Secara makro adanya ketidaksamaan pola pemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul karena akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnyapun rendah.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di pedesaan yang terdampak situasi Pandemi Virus Corona (COVID-19). Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu bentuk bantuan selama Pandemi COVID-19. Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan jenis bantuan lainnya.

1. Negara pertama kali memprakasakan BLT adalah Brasil dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besarnya dana yang diberikan oleh mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut. Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial.
2. Indonesia juga merupakan negara penyelenggara BLT, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan : hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) diselenggarakan sebagai respon dampak Pandemi Virus Corona (COVID-19), dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Undang-undang No. 7 Tahun 2020. Dalam merespon kerentanan akibat kebijakan yang diambil, Indonesia memiliki bentuk kegiatan Bencana Nonalam, kegiatan ini dapat dibiayai Dana Desa. Edukasi melalui sosialisasi yang tepat, medata penduduk rentan sakit, mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa digunakan sebagai ruang isolasi, melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih.

Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia memastikan harga minyak dunia naik, mereka pun memutuskan memotong subsidi minyak. Hal ini dilakukan dengan alasan BBM bersubsidi lebih banyak digunakan oleh orang-orang kalangan industri dan berstatus mampu. Lalu, setelah didata lebih lanjut, diketahui dari tahun 1998 sampai 2005 penggunaan bahan bakar bersubsidi

telah digunakan sebanyak 75 persen. Pemotongan subsidi terus terjadi hingga tahun 2008 dengan kenaikan sebesar 50 persen dari harga awal, karena minyak dunia kembali naik saat itu. Akibatnya, harga bahan-bahan pokok pun ikut naik.

Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin, pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Program ini dicetuskan oleh JUSUF KALLA tepat setelah dirinya dan SUSILO BAMBANG YUDHOYONO memenangkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2004. Akhirnya, berdasarkan instruksi presiden nomor 12, digalanganlah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak bersyarat pada Oktober Tahun 2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin.

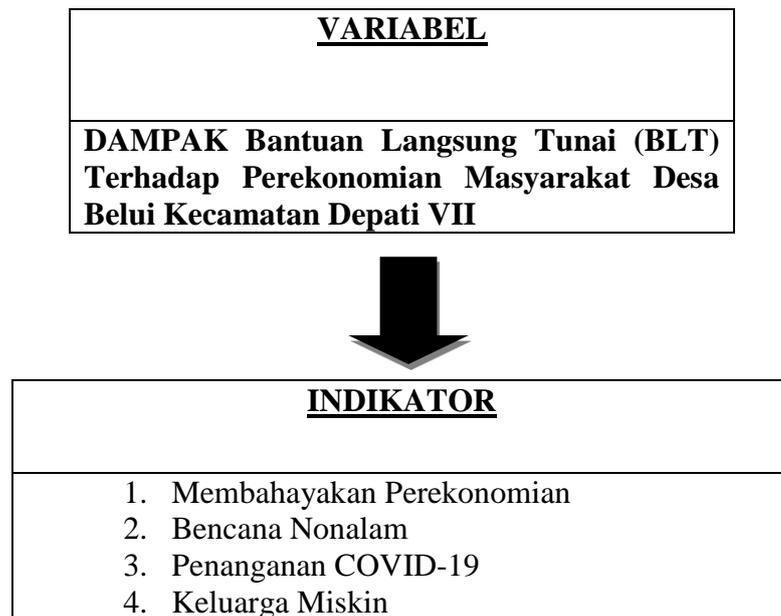
Pemerintah memutuskan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa Undang-Undang No. 7 Tahun 2020, selanjutnya pemerintah memilih memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa uang tunai kepada masyarakat miskin di tengah situasi Dampak Pandemi Virus Corona (COVID-19).

Hal yang menyangkut teknis tersebut adalah pertama, pembagian tidak merata disebabkan data yang digunakan adalah data lama. Contoh khususnya adalah kasus pemberian dana BLT pada tahun 2008 yang tidak merata dan salah sasaran karena data yang digunakan adalah data warga miskin tahun 2005. Kedua, program BLT kerap kali diciptakan untuk peluang korupsi, dengan jalan pemotongan dan bantuan dengan beragam cara. Ketiga kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan para mengurus tingkat daerah. Keempat, jumlah nominal insentif BLT sama sekali tidak memiliki pengaruh signifikan bagi kesulitan yang dihadapi warga miskin. Yang kelima, program BLT disinyalir memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

## **2.1 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan terjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau pembangian desa, atau pemekaran desa.

### **Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**



*Sumber Data : Peraturan Pemerintah Desa Nomor 11 tahun 2019*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Belui Depati VII Kabupaten Kerinci. Maka penelitian ini menggunakan metode diskriptif atau kualitatif. Menurut (Silalahi U, 2009).

Sebagai metode analisis deskriptif yang dikemukakan oleh Sugiono (2011: 79) adalah metode yang digunakan untuk menggambar atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Berupa ucapan atau tulisan yang berlaku pada orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan menghasilkan uraian yang mendalam.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan pembahasan tentang “ Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Perekonomian Desa Belui Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci ? “.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di pedesaan yang terdampak situasi Pandemi Virus Corona (COVID-19). Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu bentuk bantuan selama Pandemi COVID-19. Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima

Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan jenis bantuan lainnya.

Pemerintah memutuskan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa Undang-undang No. 7 Tahun 2020, selanjutnya pemerintah memilih memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa uang tunai kepada masyarakat miskin di tengah Dampak Pandemi Virus Corona (COVID-19).

Sebagaimana tercantum dalam pedoman petunjuk teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibuat oleh Dapertemen Sosial RI, dimana ditingkat kabupaten tahap-tahap Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dimulai dengan sosialisasi, verifikasi, pembagian kartu, pencairan dana, dan terakhir pelaporan kegiatan.

Dalam masa Pandemi COVID-19 banyak sekali masyarakat kehilangan mata pencaharian, dimana pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan, ternyata Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum bisa membantu sepenuhnya dalam memecahkan perekonomian masyarakat selama 1 bulan, dikarenakan jumlah bantuan yang berjumlah sedikit yang diberikan kepada keluarga yang menerima. Dimana dengan bantuan BLT ini hanya bisa membantu sedikit untuk kebutuhan sehari-hari, dan belum bisa memenuhi untuk kebutuhan keluarga selama 1 bulan dengan jumlah yang diterima sebesar Rp. 300.000/bulan sudah jelas tidak bisa dikatakan cukup untuk membeli sembako dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dimana hasil wawancara di atas melalui beberapa perangkat desa dan masyarakat, dimana perangkat desa memberikan penjelasan bahwa dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) sedikit membantu walaupun sedikit, tetapi untuk peningkatan masalah perekonomian yang dihadapi oleh masyarakat dikatakan tidak ada dikarenakan jumlah bantuannya sedikit, sedangkan masyarakat 9 orang penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini, 8 masyarakat memberikan penjelasan apa yang berdampak selama mendapatkan bantuan tersebut tidak ada peningkatan untuk masalah perekonomian dalam keluarga maupun hidup, dikarenakan jumlah Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini sedikit dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sembako dalam 1 bulan, dan ada salah satu masyarakat yang memberikan penjelasan dengan adanya BLT bisa membantu kebutuhan rumah tangga dalam 1 bulan.

Masyarakat berharap kepada pemerintah agar bisa meningkatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau digantikan dengan bahan pokok untuk rumah tangga yang berupa sembako agar bisa membantu masyarakat yang kurang mampu atau keluarga miskin dalam menangani masalah perekonomian keluarga selama Pandemi COVID-19.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Menurut M. Manullang pengertian Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran atau kondisi dimana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Bantuan Langsung Tunai adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk diberikan kepada masyarakat miskin. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di pedesaan yang diakibatkan situasi Pandemi Virus Corona (COVID-19).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Belui Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Membahayakan Perekonomian dengan alasan diatas tokoh masyarakat maupun pemerintah desa menilai bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) mengatakan belum ada peningkatan perekonomian maupun hidup dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).
2. Bencana Nonalam merupakan Dampak Pandemi COVID-19 yang berdampak sangat luas di seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya Desa Belui dimana sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian.
3. Penanganan COVID-19 dimana pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga yang membutuhkan. Pemerintah telah menetapkan BLT diberikan untuk membeli sembako kebutuhan rumah tangga untuk 1 bulan, tetapi sebagian masyarakat menggunakan BLT untuk keperluan lain.
4. Keluarga miskin Berdasarkan indikator Peraturan Pemerintah Desa Nomor 11 Tahun 2019 keluarga miskin sebagaimana yang dimaksud yang menerima BLT Dana Desa, tetapi ada sebagian masyarakat miskin yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

## 5.2 Saran

Pada bagian ini penulis mengajukan beberapa saran :

1. Membahayakan Perekonomian penulis menyarankan kepada Pemerintah Desa Belui agar dapat menggantikan bantuan lain agar dapat membantu masalah perekonomian masyarakat desa belui.
2. Bencana Nonalam yang sedang di hadapi masyarakat saat ini berupa Penyebaran Dampak Pandemi COVID-19 mengakibatkan masyarakat kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian. Penulis menyarankan agar pemerintah desa survey ulang untuk meberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan.
3. Penanganan COVID-19 dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) membuat sebagian masyarakat menjadi malas untuk bekerja. Penulis

menyarankan akan pemerintah desa survey ulang untuk kebijakan penerima BLT agar tepat sasaran.

4. Keluarga Miskin penulis menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan survey ulang untuk penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar tepat sasaran kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bugin H, 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PrenadaMedia Group.
- Erick S, 2010. *Pembangunan Desa*. Jakarta. PT RajaGrafinda Persada.
- Miles dan Huberman, 1192. Tentang *Analisis*.
- Ndraha, 2003. *Kyhernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*1. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Pebi Julianto. 2020. *Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Puskesmas di kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci*. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.
- Pebi Julianto. 2018. *Pengaruh Sistem Kearsipan Terhadap Efisiensi Kerja Pada koantor Camat Air Hangat Kabupaten Kerinci*. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.
- Unang Sunardjo, 1984. Tentang *Desa*. Bandung . Tarsito
- Pratikno, 1979. Tentang *Pembangunan Desa*. Bandung
- Silalahi U, 2009. Tentang Penggunaan *Motode Penelitian Sosial*. Bandung. Alfabeta
- Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif R dan D* Bandung. Alfabeta
- SP, Siagian 1978. Tentang *Pembangunan*. Bumi Aksara
- Peraturan dan Undang-undang**
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*
- UU No. 06 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 114 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta. Thanjo Kumolo.
- PERBUP No. 19 Tahun 2017 Pasal 06, Tentang *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*.
- PERMENDES Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Jakarta. ABDUL HALIM ISKANDAR.

### Sumber Lain

<http://Asal-usul.BLT.di.indonesia.com>

<http://Pengertian.BLT.com>